

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara didukung oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terutama bagi negara berkembang, UMKM memiliki peran yang lebih penting dalam mendorong pembangunan ekonomi (Bongomin, Ntayi, & Munene, 2017). Situasi serupa juga terjadi pada UMKM di Indonesia. UMKM menjadi salah satu sumber pendapatan bagi sebagian besar warga Indonesia, usaha ini hampir menyerap 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha, namun hanya berkontribusi 61,07% dari total Gross Domestic Product (Kementerian Koperasi dan UKM RI). UMKM merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam kondisi sekarang ini UMKM seringkali mengalami kondisi yang tidak stabil dan tidak berkembang. Dalam laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) pada tahun 2016, menyatakan bahwa motivasi dalam penciptaan usaha dan kemampuan pelaku usaha jika dilihat dari *entrepreneurial pipelines* mengungkapkan sebanyak 31% dari pelaku usaha kecil dewasa (18-64) memiliki niat untuk memulai bisnis dalam tiga tahun ke depan, 4% telah mendirikan sebuah bisnis, 10% menjalankan bisnis antara 3 hingga 42 bulan, dan 12 % telah memiliki dan mengelola bisnis lebih dari 42 bulan. Namun besarnya motivasi pelaku usaha terutama di daerah tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi di

lapangan. Karena pelaku usaha kerap menghadapi beberapa masalah seperti persaingan bisnis, akses pembiayaan, infrastruktur, pemasaran dan teknologi.

Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah melalui OJK dan lembaga keuangan dalam mendukung motivasi berwirausaha pelaku UMKM dan mendorong pemerataan *financial literacy*, khususnya dalam segi pembiayaan merupakan bagian dari usaha untuk membangkitkan semangat kewirausahaan di setiap daerah. Sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan *financial literacy* pemilik atau pengelola agar pertumbuhan UMKM di negara berkembang dapat tercapai. UMKM dengan *financial literacy* yang baik maka akan mampu menerapkan rencana strategis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, memiliki akses keuangan yang memadai, serta merespon perubahan iklim bisnis yang tidak stabil, sehingga keputusan yang dibuat akan memberikan solusi inovatif dan terarah untuk peningkatan kinerja UMKM.

Financial literacy sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Misalnya, mereka harus memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dan aktivitas pendanaan yang membutuhkan pengetahuan keuangan (Dahmen & Rodriguez, 2014). Pada dasarnya permasalahan terkait *financial literacy* yang dihadapi para pelaku UMKM merupakan permasalahan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap isu nasional terkait dengan tingkat *financial literacy* masih kurang. Hasil survei nasional *financial literacy* tahun 2016 menunjukkan bahwa hanya 29,66% masyarakat Indonesia yang melek pengetahuan (OJK, 2016).

Bukti ekstensif juga menunjukkan bahwa *financial inclusion* sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan (Lakuma et al., 2019). Selain itu, *financial inclusion* menjadi komponen yang mendukung stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi. Menurut Raza et al., (2019) bahwa semakin banyak masyarakat yang dengan mudah mengakses layanan keuangan, semakin cepat ekonomi bertumbuh, sehingga efek yang diharapkan tentu saja meningkatnya kemampuan ekonomi dan berkurangnya kemiskinan serta kesenjangan ekonomi. Meskipun akses keuangan universal telah meningkat di seluruh dunia (misalnya jumlah orang dewasa yang memiliki rekening bank telah meningkat dari 51% pada tahun 2011 menjadi 62% pada tahun 2014), namun *financial inclusion* yaitu akses ke berbagai layanan keuangan berkualitas dengan harga terjangkau tetap masih tertinggal (misalnya jutaan rekening bank tidak aktif atau digunakan untuk tujuan sempit seperti menerima gaji (Kelly dan Rhyne, 2015). Menurut Bongomin et al (2017), pertumbuhan UMKM masih dibatasi oleh akses ke layanan keuangan formal maupun non formal.

Kemampuan UMKM untuk berkembang, tumbuh, menopang, dan memperkuat diri sangat ditentukan oleh kapasitas mereka untuk mengakses dan mengelola keuangan. Sayangnya, UMKM termasuk usaha mikro dan start-up, di negara-negara berkembang di Asia Timur dan Selatan seperti Kamboja, Cina, Indonesia, Republik Demokratis Rakyat Laos (PDR), Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, serta negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka dalam penelitian Abe et al (2015) secara konsisten menyebutkan kurangnya akses keuangan sebagai hambatan serius bagi

perkembangan mereka (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 2009).

Pembiayaan UMKM mengacu pada berbagai mekanisme untuk menyediakan dana tambahan bagi pengembangan UMKM seperti modal dan hutang (Bar-El et al., 2017). Sementara itu, Indonesia memiliki sekitar 64,19 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau sekitar 99,99% dari total unit usaha di seluruh Indonesia, namun lebih dari 50 juta UMKM dinilai tidak *bankable* (tidak memiliki akses ke pinjaman bank), dari Rp 5.075 triliun kredit yang dikucurkan oleh bank umum di Indonesia, kurang dari 20% atau sekitar Rp 1.015 triliun saja yang ditujukan bagi UMKM (OJK, 2018; Bank Indonesia, 2018). Menurut Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019, sekitar 80% UMKM di Indonesia mengalami kesulitan pembiayaan dikarenakan terbatasnya akses pinjaman bank dan lembaga keuangan yang tidak mudah untuk didapatkan. Hal tersebut terjadi karena syarat dan proses pengajuan pinjaman yang berbelit-belit dan tidak mudah terpenuhi sehingga banyak bank yang tidak melayani permohonan pinjaman dalam jumlah kecil. Terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan ini memberikan dampak pada permodalan UMKM dimana para pelaku usaha kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan tersebut.

Kinerja bisnis pada UMKM dapat dilihat dari keberhasilan perusahaan dalam kualitas produk, inovasi, pengelolaan sumber daya manusia, pelanggan, dan pembiayaan (Fitriati et al., 2020). Para pemilik bisnis akan menjalankan bisnis mereka dengan *financial literacy* yang mereka miliki. *Financial literacy* akan memiliki dampak yang baik terhadap kinerja UMKM. Akan tetapi terdapat

research gap yang mengatakan bahwa *financial literacy* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Dalam penelitiannya, Adomako & Danso (2014) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM dan menemukan *financial literacy* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang ditemukan oleh Eniola & Entebang (2015) bahwa *financial literacy* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja UMKM.

Dalam penelitian Bongomin et al., (2017) menghasilkan bahwa *financial inclusion* secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan UMKM di negara berkembang. Namun tidak semua *financial inclusion* berdampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Dalam penelitian Lakuma et al., (2019) menemukan bahwa tidak secara signifikan akses ke keuangan menjadi kendala yang mengikat bagi pertumbuhan dan kinerja UMKM, dan perusahaan tidak dibatasi secara financial.

Perilaku pengambilan risiko memiliki dampak secara langsung terhadap kinerja perusahaan karena perusahaan yang mengambil lebih banyak risiko umumnya memiliki kinerja yang lebih tinggi dan pengembalian keuangan yang lebih baik (walaupun tidak stabil), dibandingkan dengan perusahaan yang kurang berminat untuk mengambil risiko (Rasli, 2018). Dengan demikian, pengambilan risiko dalam usaha (*risk taking entrepreneurship*) berperan penting sebagai pendorong keberhasilan kinerja UMKM (Boermans & Willebrands, 2017). Apalagi dalam kondisi yang tidak pasti, pengambilan risiko berkontribusi dalam keberhasilan kinerja UMKM dalam menentukan tindakan (Aydemir & Aren, 2017), dalam keadaan ini apa yang akan terjadi diprediksi melalui kemungkinan

hasil yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian sebelumnya *risk taking entrepreneurship* menjadi variabel perantara antara *financial literacy* dan *financial inclusion* terhadap kinerja UMKM.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian adalah ***bagaimana peran risk taking entrepreneurship dalam memediasi pengaruh financial literacy dan financial inclusion terhadap kinerja UMKM ?***

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian (research question) adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh *financial literacy* terhadap *risk taking entrepreneurship* ?
- 2) Bagaimana pengaruh *financial inclusion* terhadap *risk taking entrepreneurship* ?
- 3) Bagaimana pengaruh *financial literacy* terhadap kinerja UMKM ?
- 4) Bagaimana pengaruh *financial inclusion* terhadap kinerja UMKM ?
- 5) Bagaimana pengaruh *risk taking entrepreneurship* terhadap kinerja UMKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh *financial literacy* terhadap *risk taking entrepreneurship*.

- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh *financial inclusion* terhadap *risk taking entrepreneurship*.
- 3) Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh *financial literacy* terhadap kinerja UMKM.
- 4) Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh *financial inclusion* terhadap kinerja UMKM.
- 5) Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh *risk taking entrepreneurship* terhadap kinerja UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis, yaitu dapat menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi keilmuan di bidang Manajemen Keuangan.
- 2) Manfaat Praktis yaitu dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam pengambilan keputusan berwirausaha dan peningkatan kinerja usaha.

